

Politisasi Dakwah Di Indonesia
(Studi Analisis Politisasi Dakwah dalam Kontessasi Pemilihan Umum
di Indonesia)

Ahmad Ainun Najib

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban

Email: Ahmadnajib186@gmail.com

Abstract: *Politics in Indonesia is closely related to the dynamics of subjective differences in general elections. In Indonesian politics, there are many cases both technically during elections and cases of violations in the campaign process that have been determined by the General Election Commission (KPU) and the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), as well as from prospective election participants, one of which is that the prospective participants make a lot of mistakes in the Code of Ethics. Where religion is often used as a political tool to seek votes, in other words, politicization should not be carried out by all parties who are candidates for elections, both from the Presidential and Vice Presidential Candidate Levels to the Regency DPRD. The method in this study is to use a qualitative approach with Descriptive Analysis through Literature. The results of the research obtained have had a lot of impacts received by the state, especially the unity and integrity of the Republic of Indonesia. With the politicization of society that is easily swayed, it is far from the word healthy democracy or far from the word will politics which is still indicated by the many politics of identity, practical politics of Election Candidates, and the politicization of da'wah which is a mirror of Indonesia's politics in the past and present.*

Keywords: *Politicization of Da'wah, Indonesian Politics, Political Law*

Abstrak: Politik di Indonesia erat dengan dinamika perbedaan subjektif dalam pemilihan umum. Politik Indonesia terdapat banyak kasus baik dalam teknis saat pemilihan dan kasus pelanggaran dalam proses kampanye yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta dari para calon peserta pemilu salah satunya yaitu calon peserta banyak sekali melakukan kesalahan Kode Etik. Di mana sering menggunakan agama sebagai alat politik untuk mencari suara, dengan kata lain politisasi yang seharusnya tidak dilakukan oleh semua pihak calon peserta pemilu baik itu dari Tingkat Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan DPRD Kabupaten. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Analisis Deskriptif melalui Kepustakaan. Hasil dari penelitian yang diperoleh banyak sekali dampak yang diterima oleh negara, khususnya kesatuan dan keutuhan NKRI. Dengan politisasi masyarakat yang gampang terombang-ambing menjadikan jauh dari kata demokrasi yang sehat atau jauh dari kata politik Will yang masih diindikasikan banyaknya politik Indentitas, politik praktis dari Calon Peserta Pemilu, dan politisasi dakwah yang menjadi cermin Indonesia politik masa lalu dan masa sekarang.

Kata Kunci: *Politisasi Dakwah, Politik Indoneisa, Hukum Politik*

A. Pendahuluan

Dakwah bukan hanya merujuk pada mengajak, menyeru, memanggil, mengundang kepada kebaikan¹. Ada beberapa ayat yang mengajak pada kejahatan, namun secara etimologis dibebankan kepada orang yang beriman dan beramal saleh untuk mengajak kebaikan yang mana telah dikemukakan pada QS. Al-Baqarah ayat 221:

“Dan Allah mengajak Ke Surga dan ampunan dengan Izinnya dan Allah menerangkan Ayat-ayatnya (perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran”.

Sedangkan kata dakwah juga ada dalam kejahatan yang mengajak kepada manusia ke Neraka yang ditunjukkan oleh setan musuh bagi manusia yang telah dijelaskan dalam QS. Fatir ayat 6:

“Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”

Di era pemilu saat ini, banyak Calon Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten berlomba-lomba mencari peluang dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan masuk ke ruang lingkup agama seperti dakwah dengan memasukkan unsur politik. Hal ini bertujuan untuk mencari simpatisan orang atau mencari dukungan surat suara. Bahkan terdapat salah satu Calon Presiden melakukan dakwah politisasi dalam bentuk ceramah di masjid dengan para pendukungnya. Menanggapi fenomena tersebut, tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa dilarang menggunakan fasilitas umum dan pemerintah, pendidikan, dan tempat ibadah².

Menghubungkan politik dengan agama (Islam) bukan persoalan gampang, bahkan sering menimbulkan permasalahan tersendiri. Misalnya politik bersifat duniawi dan profan, sementara agama bersifat akhirat yang sakral dan Suci. Menurut Ali Abdur Raziq, Islam adalah agama yang menyeru kepada ke-Esaan Tuhan. Islam tidak memiliki karakter politik, karena ia hanya seruan suci agar manusia mengabdikan kepada Allah, bersaudara dengan yang lain dalam rangka pengabdian kepada-Nya serta sebuah panggilan untuk perdamaian dunia.³

¹ Muhammad Qadaruiddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 2.

² “Ceramah Anies di Masjid Batam Disebut Kampanye, TikTokers Kasih Paham Aturan Pemilu,” *suara.com*, accessed March 16, 2024, <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/21/174250/ceramah-anies-di-masjid-batam-disebut-kampanye-tiktokers-kasih-paham-aturan-pemilu>.

³ Moh Makmun and Mahmud Huda, “Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyash: Studi Terhadap Takmir Masjid Di Kota Surabaya,” *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 97.

F Adi Kusumo berpendapat bahwa berpolitik melalui dakwah seringkali menggunakan berbagai atribut dakwah dalam melakukan lobi-lobi politik. Di sini kekuasaan politik menjadi tujuan utama berdakwah. Akibatnya, kebijakan dan arah perjuangannya dapat tiba-tiba berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada. Hal ini bertujuan agar cita-cita politik yang bersangkutan dapat berada di lingkaran kekuasaan, mendapat simpati masyarakat, termasuk hal lain yang mengokohkan kepentingan politiknya dengan kendaraan dakwah. Biasanya alasan klasik yang diberikan dan seringkali diumbar serta diobral secara murah adalah dengan masuk ke dalam pusat kekuasaan politik kenegaraan baik Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Maka ekspansi dakwah kian luas dan mudah dilakukan, inilah yang sebenarnya disebut dengan “politisasi dakwah”⁴. Dapat digambarkan bahwa politisasi dakwah atau agama ditandai Ketika para tokoh agama atau ustaz yang ikut terlibat dalam politik praktis memunculkan polarisasi di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan konflik, kebencian dan akan terjebak dalam politisasi agama⁵. Selain itu, tokoh agama (Juru dakwah) yang terjebak dalam politisasi agama biasanya akan mengutip ayat-ayat maupun hadist dengan tujuan bukan untuk mengajak masyarakat untuk kebaikan, akan tetapi lebih untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya, untuk menyerang lawan politik atau caleg dengan mencocokkan kejadian dengan kisah-kisah yang tertuang dalam Al-Quran bahkan secara langsung mengaitkan perilaku salah satu lawan politik yang mempunyai kaitan erat. Perilaku ingin menjatuhkan lawan tersebut, tidak lain bertujuan untuk mencari dukungan atau simpatisan masyarakat dalam pemilu untuk memenangkannya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) antara pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan membedah eksistensi dakwah terkait politisasi dakwah maupun upaya politik praktis dalam kegiatan dakwah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan merumuskan aneka macam langkah dalam mencegah dan memproses adanya politisasi berdasarkan ilmu dakwah dan pemikiran politik will.

⁴ “Dakwah Politik dan Politik Dakwah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi,” accessed March 16, 2024, <https://www.uinjkt.ac.id/id/dakwah-politik-dan-politik-dakwah>.

⁵ dakwah.uin-suka.ac.id, “Dakwah Dan Godaan Politik,” accessed March 16, 2024, <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/760/blog-post.html>.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber pada kepustakaan primer dan sekunder melalaui penelusuran landasaan teori terkait dengan politisasi dakwah. Setelah itu, dilakukan proses reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan pembahasan

Sebelum memaparkan hasil yang diperoleh dari penelitian, penting untuk diketahui dasar dan konsep dakwah itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tidak melenceng dari pembahasan terkait definisi dakwah secara dasar. Para tokoh ulama memberikan definisi dakwah dengan bermacam-macam sesuai konteks Islam dan mempunyai landasan tersendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Masdar Helmy, di mana mengartikan dakwah itu seperti mengajak dan menggerakkan umat manusia dengan ajaran yang ditaatinya, termasuk melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan tujuan dan maksud untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendapat lain datang dari Hamzah Yaqub, di mana dakwah merupakan mengajak manusia dengan penuh hikmah dan kebijakan dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Hal ini termasuk dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Hadist secara tekstual dan kontekstual. Terakhir, Ibnu Taimiyyah mendefinisikan dakwah bahwa dakwah menuju keimanan kepada-Nya dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dengan meyakini apa yang dikhobarkan olehnya dan mentaati perintahnya⁶

Pendapat dari ketiga ulama tersebut hampir sama yaitu mengajak dan mentaati semua ajaran atau perintah dan larangannya agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah itu tidak mudah, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdakwah. Dalam berdakwah, seorang pendakwah atau Da'i mengharapakan adanya perubahan-perubahan kearah agamis. Hal ini sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hadir membawa perubahan-perubahan yang baik dalam kehidupan Masyarakat, khususnya negara Arab. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum dakwah agar tidak melenceng jauh dan agar tidak dijadikan sebagai alat untuk mencari simpatisan surat suara untuk memenangkan konsestasi kepemiluan. Berbagai bentuk dakwah ada hukumnya, seperti hukum wajib bagi setiap orang yang berdakwah dengan aksi seperti *Amar Maruf Nahi Mungkar* dengan memberikan nasihat secara langsung dan upaya berseru kepada kebaikan. Dakwah mempunyai arti luas, bukan hanya seperti

⁶ Dr. Abdur Razzaq, M.A, *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris* (Palembang: NoerFikri Offset, 2017). hlm. 2

dakwah di tayangan televisi sosial media, dan di panggung acara atau pengajian di desa-desa saja, melainkan banyak ruang lingkup. Hal ini seperti yang tertuang dalam QS. Al-Imran ayat 104 antara lain:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyeru yang ma’ruf dan mencegah dari kemungkaran dan mereka itulah orang yang mendapatkan azab yang berat”.⁷

Politik dan dakwah memang terdapat persamaan, namun karakteristiknya berbeda. Persamaannya terletak pada sama-sama mengatur dan mangajak kebaikan apabila suatu negara dan seseorang yang menjadi pemimpin menerapkan politik will atau politik yang penuh dengan membawa perubahan kearah positif. Oleh karena itu, pendapat-pendapat ulama tidak boleh dicampurkan dengan dakwah, kecuali politik sebagai alat untuk memperjuangkan dakwah di jalan yang benar, bukan hanya dakwah atau agama dijadikan alat untuk mencari kekuasaan. Saat ini, politik dapat diartikan sebagai kemahiran menghimpun kekuatan, meningkatnya kualitas dan kuantitas, mengawasi dan mengendalikan, dan menggunakan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam bernegara. Hal ini tampak lebih jelas bahwa karakteristik politik adalah sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, bahkan yang lebih ekstrim yaitu menghalalkan berbagai cara guna memenangkan kontestasi pemilu. Fenomena yang terjadi saat ini, adanya penyogokan atau serangan fajar yang diberikan kepada Masyarakat. Istilah Serangan Fajar ini sering digunakan menjelang hari di mana seseorang akan mendapatkan uang, di mana hal ini bertujuan agar orang yang diberikan uang tersebut memilihnya dalam Pemilu.⁸

1. Politisasi Di era Orde Baru Abad 20

Adapun dakwah merupakan seruan kepada setiap manusia untuk mentaati dan mengikuti jalan Allah dan Rasul melalui *Amar Maruf Nahi Mungkar*, dengan begitu orientasi dakwah sangat nyata dalam menyampaikan pesan kebaikan bagi manusia dan seluruh alam yang sempurna⁹. Di Indonesia sendiri, sejarah politisasi agama memang memiliki sejarah dan dampak yang sangat panjang dalam era perpolitikan. Ormas-ormas Islam yang dapat dikatakan besar juga ikut dalam

⁷ hamzah Khaeriyah, “Dakwah Dalam Bingkai Politik,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (April 1, 2018), hlm. 41.

⁸ Kompas Cyber Media, “Bawaslu Jabar Waspada ‘Serangan Duha’ dan ‘Serangan Zuhur’ Saat Hari Pencoblosan,” KOMPAS.com, February 13, 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/13/140807378/bawaslu-jabar-waspada-serangan-duha-dan-serangan-zuhur-saat-hari>.

⁹ andri Nirwana. An, “Akulturasi Politik Dalam Dunia Dakwah,” *Substantia* 18, no. 2 (Oktober 2016), hlm. 208.

politisasi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu dukungan. Pada awal abad ke-20, berbagai kelompok sosial politik dan agama mulai bermunculan di “Indonesia”, berbagai kelompok Islam, juga reformis murni (Persis, Muhammadiyah, dan kelompok Tradisionalis seperti Nahdlatul Ulama, Perti, Alkhairat dan lainnya), serta sosialis komunis (Liga Islam, Partai Komunis Indonesia dan lain lain). Mereka menggunakan teks, pidato, idiom, jargon, dan simbol Islam tertentu untuk menarik simpati masyarakat terhadap ormas yang mereka dirikan. Politisasi agama semakin menguat ketika “Indonesia” merdeka dan ingin membangun landasan politik pemerintahan dan negara. Setiap faksi Muslim - tradisional, reformis, Islamis, sosialis, dll menuntut Indonesia berdasarkan ideologi politik yang sesuai dengan semangat gerakannya. Puncak kebrutalan politisasi agama terjadi ketika Indonesia memasuki “Era Partai Politik” pada tahun 1950 an. Beberapa ormas Islam tidak hanya mendukung partai politik tertentu sesuai semangat dan gerakannya, bahkan ada pula yang berubah menjadi partai politik seperti NU yang dulunya Parti Nahdlatul Oelama (PNO).¹⁰

2. Politisasi di Era Demokrasi Abad 21

Aksi 411 dan 212 di Jakarta menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas muslim di Jakarta, bahkan di berbagai daerah di Indonesia dalam merespons isu penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Di sisi lain, mobilisasi masa tersebut bernuansa politisasi agama (Kresna 2017) dari tuntunan penegakan hukum terhadap Ahok melebar menjadi ladang politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut. Dengan menggunakan eksemplar Aksi 212 yang diadakan mendekati hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan adanya mobilisasi masa dalam rangka kepentingan politik tertentu (Institute for Policy Analysis of Conflict 2018). Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok dijadikan magnet kepentingan politik sebagai legitimasi terhadap politisasi agama yang dilakukan oleh lawan politiknya pada saat itu.

Salah satu tokoh politik di era Orde baru sampai era jatuhnya Presiden keempat yang menyuarakan dengan vokal gerakan #2019GantiPresiden adalah Amien Rais. Tokoh tersebut memaklumkan pernyataan yang kontroversial di kalangan para politik dan masyarakat Indonesia. Ia melakukan dikotomi dan menciptakan definisi baru dengan istilah partai Allah dan partai Setan. Berikut kutipan pernyataannya:

¹⁰ Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia,” *Maarif Institute* 13, no. 2 (Desember 2018): 43–54. hlm. 51

“Sekarang ini kita harus menggerakkan seluruh kekuatan bangsa ini untuk bergabung dalam kekuatan sebuah partai. Bukan hanya PAN, PKS, Gerindra, tapi kelompok yang membela agama Allah, yaitu Hizbullah. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Hizbusy Syaithan,... Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, baik rugi dunia maupun rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya Hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,”¹¹

Tokoh tersebut dalam tausiyah dakwahnya yang berada di salah satu masjid di Jakarta yaitu masjid Baiturahim pada 13 April 2018. Secara formal Amin Rais dapat dikategorikan dalam politisasi dakwah atau agama, karena konteksnya membicarakan sebuah politik di dalam masjid bahkan secara khusus melalui caramah-ceramahnya dengan sebutan partai setan dan partai Allah. Salah satu partai yang dimaksud adalah PAN, PKS, Gerindra, dikarenakan kelompok tersebut membela agama Allah. Salah satu ungkapan Ketika diwawancarai oleh CNN Indonesia pernyataannya sebagai Berikut:

“Orang-orang yang anti Tuhan, itu otomatis bergabung dalam partai besar, itu partai setan. Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, baik rugi dunia maupun rugi akhiratnya... Tapi di tempat lain, orang yang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya Hizbullah, Partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan,”¹²

3. Dampak Politisasi Bagi Indonesia

Tahun 2024 merupakan tahun di mana yang dianggap tahun perpolitikan. Hal ini dikarenakan adanya pemilihan umum, yang terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. 5 jenis pemilihan tersebut banyak manufer yang dilakukan oleh paslon maupun caleg dengan tujuan untuk memenangkan Pemilu tersebut, tidak bisa dipungkiri Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk dengan agama Islam paling banyak di dunia. Adapun presentase 87,2% Muslim yang mencapai 229,62 juta jiwa menurut data kementrian Agama Terbaru¹³

¹¹ Budi Kurniawan, “Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi,” *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (June 2018), hlm. 138.

¹² DHF, “Amien Rais Dikotomikan Partai Setan dan Partai Allah,” nasional, accessed March 19, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>.

¹³ Kemenag, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar),” <https://kemenag.go.id>, accessed March 19, 2024,

Ahmad Syafii Maarif mengartikan politisasi agama ialah penggunaan agama untuk tujuan politik tanpa moral, etika, dan akal sehat. Agama dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat Individual tanpa memikirkan moral etika dan akal sehat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam¹⁴. Untuk melakukan upaya pencegahan mengenai hal ini, perlu pemahaman lurus tentang keagamaan yang digunakan untuk politisasi. Memisahkan agama dan politik juga merupakan anggapan yang tidak tepat. Indonesia sebagai negara Pancasila menjunjung tinggi kedudukan agama. Dalam hal ini, politisasi agama bisa menjadi hal tidak wajar dan berdampak negatif bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara jika dipergunakan secara berlebihan dan menimbulkan kebencian, perpecahan, dan konflik antar kelompok agama. Ketua MUI KH. Muhammad Cholil Nafis menegaskan bahwa politisasi agama dilarang dalam agama Islam. Menurutnya, politisasi agama merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Islam dikarenakan sarana politik untuk manipulasi memasukkan kepentingan pribadi ke dalam agenda politik¹⁵.

Politisasi dakwah atau agama sangat populer di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mayoritas agama dan sasarannya, memang masyarakat dengan literasi menengah ke bawah, mudah terpengaruh dengan embel-embel agamis, surga, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, banyak dampak yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia jika sering dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Daerah (Pilkada) pada setiap tahunnya. Politisasi yang sering terjadi dengan mempolarisasi di tengah masyarakat dengan ayat-ayat demi Kepentingan individu. Selain itu, biasanya cocokologi ayat-ayat dengan sebuah peristiwa yang belum pasti sesuai dengan tafsiran para ulama. Mereka asal comot ayat tersebut, di mana ini juga dapat berpotensi merusak proses Demokrasi¹⁶. Hal ini dikarenakan adanya doktrinisasi sampai propaganda, terlebih lagi dengan adanya media sosial yang sangat cepat penyebarannya. Maka, sangat rawan akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan rusaknya demokrasi. Fenomena ini apabila terjadi dalam kurun waktu lama dan diabaikan akan menyebabkan politisasi agama menjadi moralitas politik tidak lagi dikedepankan. Akan tetapi, diabaikan yang akan

<https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.

¹⁴ Keimal Mihsan, "Politisasi Agama Dalam Kajian Bibliometrik," in *Religious Studies*, vol. 23 (Gunung Djati Conference Series, Bandung, 2023), 29.

¹⁵ Liputan6.com, "MUI: Politisasi Agama Tidak Dibenarkan dalam Islam," liputan6.com, November 19, 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4413031/mui-politisasi-agama-tidak-dibenarkan-dalam-islam>.

¹⁶ Riki Ronaldo and Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019," *Indonesian Journal of Religion and Society* 03 (2021): 33–48. Hlm. 35

berimbas kepada komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Mouffe dan Laclau memberikan salah satu contoh dampak politisasi menyebabkan permasalahan dalam komunitas lahirnya antagonisme sosial yang dalam konsep mereka sebut dengan hegemoni politik pada ambang batas. Selain itu, muncul isu-isu negative yang menjadi pemicu terjadinya terpecah belahnya kesatuan bangsa dan memunculkan isu-isu negative terhadap Agama.¹⁷

Politisasi dakwah sering sekali berbicara mengolok-ngolok pihak lain, bahkan terjadi fitnah dan penyebaran konten *Hoax* dengan tujuan menurunkan elektabilitas¹⁸. Dalam ajaran Islam sebagaimana banyak ayat yang tertuang dalam Al-Quran terkait berbagai larangan dengan indikasi narasi yang sering dilakukan salah satu calon dengan perkataan yang menjerumus kepada kebencian. Adapun beberapa ayat tersebut antara lain: berbuat adil termasuk terhadap kelompok yang tidak disukai (QS. Al-Maidah: 8), larangan komersialisasi atau manipulasi ayat Al-Quran (QS. Al-Baqarah: 41), larangan fitnah dan adu domba (QS. Al-Qalam: 10-11 dan QS. Al-Lumazah: 1), dan larangan mengolok-olok atau membenci kelompok lain (QS. Al-Hujurat: 11 dan al-An'am: 108)¹⁹. Keberadaan Calon Peserta Pemilu dapat memberikan efek bagi bangsa yang tidak sepele yaitu dapat menimbulkan runtuhnya NKRI. Sebagai masyarakat, tentu harus introspeksi diri dengan terjadinya politisasi ini. Selain itu, harus mengetahui indikator atau penyebab terjadinya politisasi tersebut. Mansurni Abdi menyebutkan terdapat enam perkara atau penyebab praktik politisasi yang hingga saat ini masih terjadi. Adapun keenam penyebab tersebut antara lain:

- a. Budaya ini tetap mengakar dan bahkan dianggap sebagai "budaya partisan" yang normal, menggunakan logika "kita" melawan "mereka" atas nama keterikatan kelompok.
- b. Selalu ada aktor politik termasuk aktivis agama yang melabeli, melegitimasi dan mempopulerkan politik identitas negatif.
- c. membenarkan praktik marginalisasi ruang identitas sosial, teologis, budaya, dan ekonomi merupakan pemicu terjadinya revolusi sosial.
- d. Meningkatnya ide-ide ekstremis di ruang public, munculnya isu mosi tidak percaya pada pemerintahan saat ini.

¹⁷ Achmad Solechan, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Muhammad Syauquillah, "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (n.d.), hlm. 493.

¹⁸ 1Najahan Musyafak, and 2Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Narasi Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 85–106.h.89.

¹⁹ "Sekolah Pascasarjana | Membendung Politisasi Agama," accessed March 27, 2024, <https://graduate.uinjkt.ac.id?p=19353>.

e. Masyarakat masih sangat minim informasi dan budaya politik²⁰

Dengan beberapa kasus yang terjadi, kita sadari munculnya polarisasi agama sering terjadi menjelang pemilu, di mana isu-isu agama diangkat dalam ranah politik yang menjadikan wacana politik berbau agama. Masuklah para pemain politik yang sering melakukan politisasi dalam bentuk apapun, terlebih lagi kaitannya dengan agama Islam yang menjadi basis agama terbesar di Indonesia. Politisasi yang berbau agama ini juga sering memicu konflik sosial antar agama, dengan indikasi retorika yang sangat keras, serangan verbal atau penyebaran berita-berita atau pola pikir yang menghasut dan memunculkan ketegangan antar masyarakat²¹

Pendiri lembaga survei Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) menyebut faktor agama turut menentukan pemilih dalam pemilihan presiden maupun legislatif di Pemilu 2024. Faktor agama dinilai sudah menjadi hal terpenting dalam memengaruhi perilaku politik masyarakat. Hasil temuan itu diperoleh dari serangkaian observasi sejak tahun 2021 hingga 2022 melalui survei Nasional dengan sampel mencapai 8.319 responden.²²

Segelintir contoh dalam politisasi bukan hanya dari Capres maupun Cawapres, namun juga terjadi di kalangan Caleg sebagaimana yang dijelaskan oleh Bawaslu kajian pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tigaraksa, Amud dan para koleganya sesama Caleg Golkar, dinyatakan terbukti telah menggelar kampanye di rumah ibadah. Ketua Panwaslu Kecamatan Tigaraksa, Erawan Heriadi dalam keterangan persnya menyatakan, dari hasil kajian yang dilakukan, pihaknya menyatakan para Caleg Golkar tersebut telah melanggar aturan Pemilu²³

D. Penutup

Politik sebagai media dakwah dalam menyebarkan agama Islam memang sangat diperbolehkan dengan niat menyampaikan pesan dan mengajak kepada masyarakat melalui kekuatan pemerintah/politik, namun sebaliknya pemanfaatan dari agama dijadikan alat politik bukan politik yang dijadikan alat

²⁰ Achmad Solechan, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Muhammad Syauquillah, "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024," hlm. 494.

²¹ Firdaus M. Yunus, Taslim HM. Yasin, and Syamsul Rijal, "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Kontekspemilu Di Indonesia," *Urnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2 September): 121–37.hlm .134

²² Anugrah Andriansyah, "Survei SMRC: Agama Turut Jadi Penentu Pemilih dalam Pemilu 2024," VOA Indonesia, October 15, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-agama-turut-jadi-penentu-pemilih-dalam-pemilu-2024/6790635.html>.

²³ Redaksi Solopos.com, "Kampanye di Masjid Sukoharjo, Caleg DPR Dari Partai Gerindra Dituntut 5 Bulan Penjara," Solopos.com, May 7, 2019, <https://soloraya.solopos.com/kampanye-di-masjid-sukoharjo-caleg-dpr-dari-partai-gerindra-dituntut-5-bulan-penjara-990334>.

untuk berdakwah itu sudah tidak benar dan dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan bahaya yang timbul lebih besar daripada sekadar mencari suara dalam pemelihan umum maupun pemilihan daerah yang terjadi di Indonesia. Efek negative yang diterima bangsa kita tidak kecil yaitu tergerusnya moral politik serta akal sehat bahkan Ketika sudah masuk dalam over dosis, politisasi akan menyebabkan perpecahan di masyarakat dan runtuhnya NKRI, Sebagai warga negara kita harus mengetahui dan menjahui politisasi yang berkedok agama dan agar kita tidak terjun di dunia politik praktis maupun politik identitas yang bersifat politik hanya untuk kepentingan diri sendiri.

E. Daftar Pustaka

- Solechan, Achmad, Luthfi Zuhdi, Muhammad, & Syauqillah, Muhammad, *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024*, Jurnal Bimas Islam, Vol 16, No. 2 (n.d.).
- Nirwana. AN, Andri. *Akulturası Politik Dalam Dunia Dakwah*, Substantia, 2016, 18, no. 2.
- Andriansyah, Anugrah. *Survei SMRC: Agama Turut Jadi Penentu Pemilih dalam Pemilu 2024*. VOA Indonesia, October 15, 2022.
<https://www.voaindonesia.com/a/survei-smrc-agama-turut-jadi-penentu-pemilih-dalam-pemilu-2024/6790635.html>.
- Kurniawan, Budi. *Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi*, Jurnal Sosiologi Agama, 2018, Vol 12, No. 1.
- “Dakwah Politik dan Politik Dakwah | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi.” Accessed March 16, 2024.
<https://www.uinjkt.ac.id/id/dakwah-politik-dan-politik-dakwah>.
- dakwah.uin-suka.ac.id. “Dakwah Dan Godaan Politik.” Accessed March 16, 2024.
<https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/760/blog-post.html>.
- DHF. “Amien Rais Dikotomikan Partai Setan dan Partai Allah.” nasional. Accessed March 19, 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah>.
- Dr. Abdur Razzaq, M.A. *Dakwah Dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris*. (Palembang: Noer Fikri Offset, 2017).
- Firdaus M. Yunus, Taslim HM. Yasin, & Syamsul Rijal. *Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia*. Urnal Sosiologi Dialektika Sosial, Vol 9, No. 2.

- Khaeriyah, Hamzah. *Dakwah dalam Bingkai Politik*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 2018, Vol 10, No 1.
- Mihsan, Keimal. *Politisasi Agama Dalam Kajian Bibliometrik*, In *Religious Studies*, 2023, Vol. 23.
- Kemenag. "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)." <https://kemenag.go.id>. Accessed March 19, 2024. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>.
- Liputan6.com. "MUI: Politisasi Agama Tidak Dibenarkan dalam Islam." liputan6.com, November 19, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4413031/mui-politisasi-agama-tidak-dibenarkan-dalam-islam>.
- Makmun, Moh, and Mahmud Huda. *Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Takmir Masjid Di Kota Surabaya*. Jurnal Politik Profetik, 2019, Vol 7, No 1
- Media, Kompas Cyber. *Bawaslu Jabar Waspadai 'Serangan Duha' dan 'Serangan Zuhur' Saat Hari Pencoblosan*. KOMPAS.com, February 13, 2024. <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/13/140807378/bawaslu-jabar-waspadai-serangan-duha-dan-serangan-zuhur-saat-hari>.
- Qadaruddin Abdullah, Muhammad. *Pengantar Ilmu Dakwah*. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)
- Musyafak, Najahan, & Hasan Asy'ari Ulama'i, Ahmad. *Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)*. Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol 39, No. 2.
- Ronaldo, Riki & Darmaiza. *Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019*. Indonesian Journal of Religion and Society, 2021, Vol 03.
- "Sekolah Pascasarjana | Membendung Politisasi Agama." Accessed March 27, 2024. <https://graduate.uinjkt.ac.id?p=19353>.
- Solopos.com, Redaksi. "Kampanye di Masjid Sukoharjo, Caleg DPR Dari Partai Gerindra Dituntut 5 Bulan Penjara." Solopos.com, May 7, 2019. <https://soloraya.solopos.com/kampanye-di-masjid-sukoharjo-caleg-dpr-dari-partai-gerindra-dituntut-5-bulan-penjara-990334>.

Suara.com. "Ceramah Anies di Masjid Batam Disebut Kampanye, TikTokers Kasih Paham Aturan Pemilu." Accessed March 16, 2024.

<https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/21/174250/ceramah-anies-di-masjid-batam-disebut-kampanye-tiktokers-kasih-paham-aturan-pemilu>.

Al Qurtuby, Sumanto. *Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia*. Maarif Institute, 2018, Vol 13, No. 2.